

Dongeng sebagai Pendidikan Anti Korupsi pada Anak Usia Dini

Eka Sri¹, Syifa Nuraeni²

^{1,2} STKIP PGRI Sukabumi

Info Artikel

Article history:

Received Jan, 2023

Revised Jan, 2023

Accepted Jan, 2023

Kata Kunci:

Anti Korupsi, Dongeng, Anak Usia Dini

Keywords:

Anti-Corruption, Fairy Tales, Early Childhood

ABSTRAK

Korupsi merupakan ancaman besar bagi sebuah negara. Betapa banyak kerugian yang harus ditanggung negara akibat para koruptor yang memakan uang rakyat. Dalam rangka mengatasi kasus korupsi yang semakin meluas perlu adanya pendidikan anti korupsi. Upaya tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan memasukkan dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan anak usia dini sebagai langkah yang strategis, karena pada usia tersebut sebagai masa keemasan yang akan menentukan bagi masa depannya kelak. Pendidikan anti korupsi pada anak usia dini dapat dilakukan dengan metode dongeng. Relevansi keduanya adalah dongeng sebagai hiburan dan menanamkan nilai karakter anti korupsi. Dongeng menyebarkan pesan moral tanpa anak menyadari dirinya sedang disuntik nilai-nilai kebaikan. Dongeng menjadi jalan mewujudkan kaidah dasar, bahwa penanaman nilai dapat dilakukan tanpa kesan memaksa dan menekan. Pendidikan anti korupsi pada anak usia dini dengan dongeng adalah memberikan cerita atau dongeng yang di dalamnya bermuatan pemahaman, sikap, dan perilaku yang anti terhadap korupsi. Nilai karakter yang menjadi unggulan dalam dongeng adalah pentingnya kejujuran, dan tidak rakus atau tamak.

ABSTRACT

Corruption is a big threat to a country. How much loss must be borne by the state due to corruptors who eat people's money. To deal with widespread corruption cases, it is necessary to have anti-corruption education. One of these efforts can be done by including it in the education curriculum. Early childhood education is a strategic step because at that age it is the golden age that will determine their future. Anti-corruption education in early childhood can be done using the fairy tale method. The relevance of both is fairy tales as entertainment and instilling anti-corruption character values. Fairy tales spread moral messages without children realizing that they are being injected with good values. Fairy tales are a way to realize the basic principle that instilling values can be done without the impression of being forced and pressured. Anti-corruption education in early childhood with fairy tales to provide stories or fairy tales which contain the anti-corruption understanding, attitudes, and behavior. The character value that is featured in fairy tales is the importance of honesty, and not being greedy or greedy.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Eka Sri

Institution: STKIP PGRI Sukabumi

Email: ekasridamayanti08@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Ungkapan maupun tulisan “Berani jujur itu hebat” sering kita saksikan baik dalam media masa, maupun menyaksikannya langsung. Kalimat itu merupakan jargon dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas untuk menangani permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Makna ungkapan tersebut adalah untuk mengajak masyarakat Indonesia supaya berani bersikap jujur. Jujur dalam tindakan, perbuatan maupun lisan. Ini sebagai bentuk keresahan negara maupun masyarakat akibat semakin banyaknya orang yang tidak bersikap jujur. Korupsi adalah salah satu bentuk ketidakjujuran tersebut.

Secara sederhana orang awam berpikiran bahwa korupsi adalah usaha mengambil uang yang bukan miliknya untuk memperkaya dirinya. Namun tidak hanya itu, secara jelas dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Di negara ini kasus korupsi kian merajalela dan cenderung mengalami peningkatan. Banyak sekali kasus korupsi yang dilakukan oleh para wakil rakyat, yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakatnya. Bila di ungkap secara lebih, masih banyak kasus lagi yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Dilansir dari laman resmi KPK, dalam semester pertama tahun 2022, KPK telah melakukan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 perkara *inkracht*, dan mengeksekusi putusan 51 perkara. Jika dirinci perkara yang sedang berjalan pada semester pertama sebanyak 99 kasus yang terdiri dari 63 kasus *carry over* dan 36 kasus baru dengan 61 *spindik* yang diterbitkan.

Carry over merupakan kasus yang sudah berlangsung lama namun kemudian dikembangkan oleh KPK dan ditemukan dugaan tindak pidana korupsi lain. Tak hanya itu, KPK juga telah melakukan 52 kali penggeledahan dan 941 penyitaan dalam proses penyidikan perkara. Pada Semester I 2022, KPK telah memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi atau *asset recovery* sebesar Rp313,7 miliar. Total *asset recovery* ini terdiri dari Rp248,01 miliar yang merupakan pendapatan uang sitaan hasil korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan uang pengganti yang telah diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan. Lalu, Rp41,5 miliar berasal dari pendapatan denda dan penjualan hasil lelang korupsi dan TPPU, serta Rp24,2 miliar berasal dari penetapan status penggunaan dan hibah. Capaian *asset recovery* ini meningkat 83,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Semester I 2021, angka *asset recovery* KPK senilai Rp171,23 miliar.

Salah satunya adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi LNG di PT Pertamina. Kasus ini termasuk dalam kasus prioritas untuk diselesaikan. Sebelumnya, kasus dugaan korupsi tersebut ditangani oleh Kejaksaan Agung. Namun, kasus ini kemudian dilimpahkan ke KPK. Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan tersangka dalam kasus LNG di PT Pertamina. Sebanyak empat saksi telah diperiksa, yakni Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto, mantan Dirut PT PLN Nur Pamudji, Dewan Komisaris PT Pertamina periode 2010-2013 Evita Herawati Legowo, dan Dosen IPB Anny Ratnawati.

KPK juga telah melakukan pencekalan ke luar negeri kepada empat orang tersebut. Selain itu, di tahun 2022, KPK juga melakukan pengungkapan sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah, yakni Bupati Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak dan Bupati Bogor Ade Yasin. Ricky Ham Pagawak hingga saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kasus termutakhir yang menarik perhatian adalah kasus dugaan korupsi yang melibatkan Rektor Universitas Negeri Lampung (Unila), Prof Dr Karomani. Ia terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Sabtu (20/08/2022) dini hari. Dalam OTT tersebut, Karomani ditangkap bersama sejumlah pejabat kampus dengan barang bukti berupa uang sekitar Rp 2 miliar. Karomani dan beberapa pejabat kampus diduga mengatur proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ia disebut

mematok tarif beragam mulai dari Rp100 hingga Rp 350 juta per mahasiswa yang ingin lolos lewat jalur mandiri. Total uang yang diterima Karomani dan kroninya sebesar Rp5 miliar. Selain Karomani, tersangka lain yang telah ditetapkan KPK, yaitu Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryadi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, dan Andi Desfiandi yang merupakan penyuap dalam kasus korupsi yang ada di negara perlu mengacu pada *Corruption Perception Index* (CPI). Yaitu indeks komposit yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan politisi. Sejak diluncurkan pada tahun 1995, CPI telah digunakan oleh banyak negara sebagai rujukan tentang situasi korupsi dalam negeri dibandingkan dengan negara lain.

Menurut Badan Pusat Statistik indeks perilaku anti korupsi (IPAK) Indonesia 2022 sebesar 3,93 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian 2021 (3,88). Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Nilai Indeks Persepsi 2022 sebesar 3,80 menurun (0,03 poin) dibandingkan Indeks Persepsi 2021 (3,83). Sebaliknya, Indeks Pengalaman 2022 (3,99) meningkat sebesar 0,09 poin dibanding Indeks Pengalaman 2021 (3,90). IPAK masyarakat perkotaan 2022 lebih tinggi (3,96) dibanding masyarakat perdesaan (3,90). Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin antikorupsi. Pada 2022, IPAK masyarakat pendidikan dasar (SD ke bawah) sebesar 3,87; menengah (SMP dan SMA) sebesar 3,94; dan tinggi (di atas SMA) sebesar 4,04.

Dari beragam pemaparan tadi di atas telah terungkap bahwa korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang perlu penanganan yang serius. Dikarenakan kejahatan tersebut membawa kerugian terhadap negara. Betapa banyak uang rakyat yang dimakan oleh koruptor untuk kepentingannya sendiri. Namun disisi lain banyak warga yang miskin dan kurang mendapat perhatian dari negara. Korupsi juga dapat menghambat proses pembangunan negara, dikarenakan uang yang ada telah di curi para koruptor. Dalam hubungan dengan negara lain, kasus korupsi memberikan citra atau label bahwa orang Indonesia itu budayanya seperti itu. Dengan demikian akan menjadi kekhawatiran bagi negara lain yang ingin menjalin kerja sama mitra dengan Indonesia.

Perlu solusi untuk memutus rantai korupsi yang ada di Indonesia ini. Seperti yang diungkapkan ICW dalam situs *online* anti korupsi, bahwa mengacu pada analisis dan kajian tren korupsi 2015, beberapa hal penting perlu segera dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Pertama, konsolidasi atas semua data penanganan kasus korupsi, baik yang ditangani Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK sehingga terdapat satu sumber informasi yang kredibel bagi publik luas. Kedua, optimalisasi atas sistem informasi perkara yang telah dimiliki oleh APH sehingga informasi yang tersedia merupakan informasi yang *up to date*. Langkah yang membuat para pelaku korupsi jera adalah dengan memberikan hukuman penjara dan denda. Hal tersebut dianggap sebagai tindakan represif yaitu dengan cara memberikan hukuman. Adapun solusi lain dengan tindakan preventif yaitu pencegahan dengan memasukkan dalam pendidikan formal, maupun informal.

Tindakan preventif yang dilakukan dalam lembaga pendidikan dapat dilakukan dengan pengenalan beragam kasus korupsi, bentuk korupsi, akibat serta dampak yang diakibatkannya. Mengingat kasus korupsi tidak hanya sebatas pencurian uang dan tindakan memperkaya diri saja, namun ada beberapa kegiatan yang diasumsikan sebagai cikal bakal dari korupsi. seperti halnya berkata tidak jujur, budaya menyontek, mencuri, serta pemberian barang/ hadiah kepada guru (gratifikasi).

Banyak anak-anak kita berkata tidak semestinya seperti halnya meminta uang untuk membeli buku, tetapi kenyataannya digunakan untuk main *game online*. Anak pamitnya berangkat ke sekolah, namun berhenti di warung internet. Perilaku menyontek saat ujian juga masih marak di kalangan pelajar. Budaya malas membaca dan belajar mengakibatkan mengambil jalan pintas dengan meniru jawaban milik teman. Lebih canggih lagi saat ini bisa menyontek dengan *handphone*

smartphone. Begitulah bentuk lain atau cikal bakal yang nantinya akan menjurus pada tindakan korupsi.

Perlunya tindakan preventif atau pencegahan kasus korupsi dimulai dari anak usia dini, yaitu mereka yang berada pada tahapan usia nol sampai enam tahun. Anak pada usia tersebut dikatakan sebagai masa keemasan (*golden age*) yang sangat tepat untuk memberikan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan. Stimulasi yang diberikan terkait dengan pengenalan nilai-nilai karakter anti korupsi. Untuk anak usia dini tidak langsung kepada kasus korupsi, namun untuk nilai-nilai yang relevan. Seperti misalnya mengenalkan anak tentang pentingnya sikap jujur, tidak suka mencuri, giat berusaha dan sebagainya. Langkah tersebut juga sebagai upaya untuk penanaman nilai karakter pada umumnya. Pendidikan tidak hanya menghasilkan anak yang berpusat pada kemampuan kognitif saja, namun juga menghasilkan individu yang berbudi dan berkarakter yang baik.

Tindakan pencegahan terhadap kasus korupsi dapat dikatakan sebagai pendidikan anti korupsi yang sebaiknya dimulai sejak usia dini. Dalam pelaksanaannya perlu beberapa metode yang disesuaikan dengan karakteristik anak. Mereka bersifat unik berbeda dengan orang dewasa, sehingga metode pembelajarannya relevan dengan tingkat perkembangannya. Dongeng sebagai salah satu metode pendidikan anak usia dini yang cukup familier. Secara makna dongeng merupakan teknik bercerita yang mengangkat kisah fiktif yang berguna untuk pendidikan karakter dan hiburan. Dua kata kunci itulah yang relevan saat dongeng disampaikan sebagai metode pendidikan anti korupsi. Yang pertama sebagai hiburan karena anak usia dini belajarnya sambil bermain.

Tidak jarang memunculkan tawaan maupun hiburan yang memancing anak tertawa. Makanya dalam dongeng terdapat beberapa ekspresi lucu, dramatisasi adegan sera gerakan gestur tubuh yang membuat anak tertarik untuk mengikutinya. Yang kedua sebagai pendidikan karakter, yang mana secara khusus karakter anti korupsi seperti jujur, suka berbagi, kerja keras dapat termaktub dalam makna karakter tersebut.

Kelebihan lain dalam dongeng bahwa dalam penerimaan nilai karakter atau moral anak masih menggunakan imajinasinya. Makanya tidak jarang dalam dongeng menggunakan tokoh fiktif atau cerita fiktif yang mengajak anak untuk berimajinasi, berpura-pura selayaknya mereka berada pada kisah tersebut. Dengan demikian maka dongeng mempunyai keterkaitan dalam pendidikan anti korupsi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Korupsi

Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya (Muhammad, 2003). Sedangkan kata *corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap (Nasir, 2006). Istilah bagi semua orang mungkin sudah tidak asing lagi. Istilah tersebut sudah sering muncul dalam pemberitaan surat kabar maupun media elektronik yang ramai membicarakan para koruptor. Mungkin bagi sebagian orang berasumsi bahwa korupsi adalah menggelapkan uang saja, lebih dari itu korupsi memiliki beberapa definisi. Seperti yang dalam kamus Bahasa Indonesia versi *online* menjelaskan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain; penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi.

Dalam Kamus Lengkap *Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary)* korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuaian atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang

dipergunakan World Bank, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*). Ditambah lagi dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan dalam UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang tindak pidana korupsi meliputi (1) Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara. (2) Menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan negara, misalnya menyuap petugas, pemerasan, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak pidana korupsi. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu bentuk penyalahgunaan wewenang untuk mencari keuntungan sendiri dan merugikan negara dalam upaya untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, rekanan, dan teman atau kelompoknya.

Dari beberapa definisi tentang korupsi Anwar (2022) mengumpulkan beberapa poin tentang korupsi yaitu pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta atau masyarakat, dan juga perusahaan. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain dan korporasi lembaga tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat atau negara.

2.2 Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi merupakan langkah yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan korupsi melalui pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting untuk mengenalkan tentang korupsi, jenis korupsi, dan beberapa cara untuk mencegahnya. Secara umum pendidikan anti korupsi adalah program pembinaan yang dijalankan secara terstruktur dalam rangka membangun pengetahuan tentang korupsi, membangun kesadaran masyarakat tentang dampak dari korupsi serta kepedulian dengan melakukan pencegahan.

Dalam panduan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di Madrasah yang diterbitkan Kementerian agama RI menjelaskan bahwa sebagai usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di madrasah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi, berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai antikorupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Makna madrasah hanya sebagai sampel dari jenjang pendidikan. Mengingat panduan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan dikhususkan untuk madrasah.

Secara makna pendidikan anti korupsi dimasukkan dalam beberapa layanan pendidikan baik formal, non formal, dan informal. Teknis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pada beberapa mata pelajaran, memasukkan dalam kurikulum sekolah, membiasakan anak dan mencontohkan nilai-nilai anti korupsi. Nilai anti korupsi merupakan bagian dari pendidikan karakter yang sudah menjadi program unggulan pemerintah dalam membiasakan anak dengan nilai yang positif. Kehadirannya dikarenakan semakin maraknya kasus korupsi yang ada di negeri ini, sehingga langkah yang diambil melalui pendidikan anti korupsi.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif dan psikomotorik saja, namun perlu juga afektif. Melalui aspek efektif dapat menjadi benteng bagi individu dalam menerapkan ilmu maupun keterampilan yang dimilikinya. Seperti halnya saat ini banyak orang yang cerdas dan punya jabatan namun tidak memiliki nilai karakter yang bagus. Sama halnya dengan korupsi yang mana menjerat

para pelaku dengan kecerdasan dan pangkat yang tinggi. Mereka lalai dengan amanah yang diembannya sehingga terlalu mudah untuk melakukan tindakan yang merugikan negara dan memperkaya diri.

Ungkapan tersebut diperkuat oleh Agus Wibowo bahwa pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik), terhadap penyimpangan perilaku korupsi Pendidikan anti korupsi dapat dikatakan sebagai bagian dari pendidikan karakter. Ruang lingkungannya lebih kecil, karena hanya terfokus pada beberapa nilai anti korupsi. Pendidikan karakter diartikan sebagai upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada anak didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan, kepada Tuhan YME, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan agar menjadi manusia yang berakhlak.

Nilai-nilai karakter dalam pendidikan karakter jumlahnya 15 di antaranya kecintaan terhadap Tuhan YME, kejujuran, disiplin, toleransi dan cinta damai, percaya diri, mandiri, tolong menolong, kerja sama, dan gotong royong, hormat dan sopan santun, tanggung jawab, kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, kreatif, rendah hati, peduli lingkungan, dan cinta bangsa dan tanah air. Dari beragam nilai tersebut kemudian untuk pendidikan anti korupsi disederhanakan menjadi 9 yaitu kerja sama, keadilan, kejujuran kepedulian, tanggung jawab, kedisiplinan, keberanian, kegigihan, kesederhanaan. Pendidikan anti korupsi memiliki tujuan di antaranya memberikan pemahaman kepada anak didik tentang definisi korupsi. Meliputi macam dan beragam jenis tindakan korupsi. Dengan begitu anak didik akan memahami tentang korupsi, ada upaya untuk berperilaku anti korupsi serta usaha melawan, menghindari atau mencegah kasus tersebut. Saat tujuan tersebut telah tercapai maka dapat menciptakan kreativitas program yang mendukung gerakan anti korupsi. Seperti misalnya memasukkan nilai anti korupsi dalam kegiatan bazar di sekolah, menjadikan tema anti korupsi dalam acara perpisahan sekolah dan sejenisnya.

Oleh Dharma (2004) secara umum tujuan pendidikan anti- korupsi adalah (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2) pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Tujuan sebelumnya sejalan dengan pemikiran Lickona (1991) yang menjelaskan tentang tujuan nilai yang pertama mengenalkan nilai-nilai karakter (moral knowing), dengan tujuan anak dapat mengetahui tentang beragam nilai beserta dampaknya. Kedua merasakan nilai (moral feeling) artinya anak dapat merasakan tentang nilai yang telah mereka lakukan. Saat anak melakukan nilai anti korupsi mungkin dapat memetik manfaatnya seperti disenangi teman, mendapat pahala serta menjalankan perintah agama. Dalam hati mereka mendapatkan ketenangan dibandingkan dengan melakukan nilai korupsi. Dengan korupsi berdampak buruk bagi kehidupan anak yaitu dibenci teman, mendapat nilai agama jelek, serta dihantui rasa takut bersalah. Ketika melakukan nilai (moral action) yaitu tahapan akhir melakukan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Saat anak dapat merasakan dampak/ akibat yang ditimbulkan dari perilaku yang dijalannya maka jika baik akan ada motivasi untuk mengulangnya dan begitu juga sebaliknya.

2.3 Pendidikan Anti Korupsi Pada Anak Usia Dini Dengan Dongeng

Pendidikan anti korupsi pada anak usia dini adalah upaya pencegahan terhadap kasus korupsi yang dimulai sejak anak usia dini. Apabila di awal telah disinggung upaya pencegahan dimulai dengan mengenal bentuk korupsi, jenis korupsi dan upaya untuk

mencegah, menghindari serta menolak korupsi. Mengingat subjeknya anak usia dini maka pendidikan korupsi anak usia dini juga disesuaikan dengan subjeknya. Mereka yang berada pada tahapan nol sampai 6 tahun belum mengenal tentang korupsi. Mereka hanya mengenali beberapa tindakan yang merupakan bagian kecil dari korupsi. Seperti halnya mencuri, meminjam barang tidak ijin, malas belajar, tidak peduli dengan sesama. Jika kasusnya demikian, maka anak mudah untuk menerima konsekuensi dari perilaku tersebut. Selain anak mengetahui tentang macam dari korupsi maka juga ada tindakan untuk menjauhi atau menolaknya.

Dongeng merupakan bagian dari metode pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu tepat apabila digunakan sebagai metode pendidikan anti korupsi. Kesesuaian ini berdasarkan fungsi pokok dongeng adalah sebagai hiburan dan pendidikan karakter. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah anak usia dini dalam menerima tentang nilai yang baik dan buruk masih menggunakan imajinasi. Anak masih sulit jika kita mengajarkan kepada mereka tentang nilai karakter ini boleh dilakukan dan tidak. Dalam menerima nilai mereka lebih suka pada cerita fiktif atau nyata yang karakteristik ceritanya disesuaikan dengannya. Sebagai contoh pada usia di bawah 4 tahun anak bisa dikenalkan nilai dengan tokoh dari kalangan hewan (fabel). Namun pada usia 4-6 tahun anak lebih menyukai dongeng jenaka maupun tokoh perjuangan.

Kekuatan imajinasi dalam dongeng merupakan proses kejiwaan yang penting. Dikatakan demikian karena dengan imajinasi akan membangun kekuatan rasa ingin tahu anak yang tinggi. Dari rasa ingin tahu itu akan melahirkan generasi yang kritis dan mendukung kecerdasannya. Selain imajinasi dongeng sebagai trik untuk mendidik dengan tidak menyakiti. Terkadang anak merasa sakit bila diperintahkan oleh orang tuanya untuk melakukan beberapa hal, namun anak itu belum tahu maksud dan tujuan melakukannya. Melalui dongeng seorang guru atau orang tua dapat menginspirasi tanpa menggurui. Mereka tidak perlu susah untuk memerintahkan anak, karena anak sudah belajar lewat cerita yang dibangunnya. Dengan dongeng anak bisa berpikir, jika kita berbuat yang baik maka akan menerima hal baik begitu juga sebaliknya. Di samping itu contoh dalam dongeng berfungsi sebagai teladan, sehingga ada sebutan bahwa dongeng itu mencontoh dengan meneladani. Anak akan menjadikan figur tokoh dalam dongeng sebagai idolanya. Jika sudah demikian maka ia akan berusaha untuk meniru tokoh kesayangannya tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode internet *searching* di mana proses pencarian data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel ataupun perundang-undangan secara *online* yang berkaitan objek penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi

Pada tahapan implementasi dilakukan dengan memadukan 3 unsur yaitu pendidikan anti korupsi, anak usia dini, dan dongeng. Untuk anak usia dini dan dongeng sudah menjadi kesatuan karena itu merupakan metode yang sering digunakan pada tahapan usia tersebut. Saat ini yang perlu dipikirkan adalah cara untuk menggabungkan dongeng dan pendidikan anti korupsi. Oleh Center (2006) menjelaskan bahwa cara implementasinya dengan beberapa tahapan yaitu (1) Pengetahuan tentang korupsi, (2) Pengembangan sikap, (3) Perubahan sikap, (4) Perspektif Moral dan Konvensional, (5) Pengembangan Karakter anti korupsi. Dari semua tahapan tersebut menggunakan bantuan dongeng untuk melaksanakannya.

Pada anak usia dini, apabila menggunakan tahapan sebelumnya terlalu rumit. Oleh Lickona (1991) memberikan panduan dengan cara mengetahui nilai anti korupsi (moral

knowing), merasakan nilai anti korupsi (moral feeling), dan melakukan nilai anti korupsi (moral action). Selanjutnya dongeng anak usia dini tentang pendidikan anti korupsi tinggal dimasukkan dalam setiap tahapan tersebut.

Mengetahui pendidikan anti korupsi

Dongeng mengantarkan anak usia dini untuk mengetahui tentang maksud dari korupsi. Untuk anak usia dini pengenalannya secara sederhana dengan menyebutkan contoh yang merupakan bagian dari kasus korupsi. Ditambah dengan dampak yang diakibatkan jika melakukan nilai karakter anti korupsi tersebut. Pada tahapan pengenalan nilai dilakukan dengan pembukaan, isi dan penutup. Pembukaan berisi tentang pemusatan perhatian kepada guru yang mau mendongeng. Mereka perlu menggunakan metode yang dapat menarik perhatian anak untuk mengikutinya. Mengingat fungsi dongeng yang pertama adalah sebagai hiburan, maka saat pembukaan bisa menggunakan variasi tepuk, nyanyi dan lagu, pantomim, maupun dramatisasi adegan. Jika di awal anak sudah tertarik dan terhibur dengan aksi pendongengannya, maka selanjutnya akan mudah dalam penyampaian nilai

Pada tahapan isi dilakukan dengan menyampaikan pesan moral anti korupsi melalui cerita. Pesan moral yang diangkat di antaranya kerja sama, keadilan, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, kedisiplinan, keberanian, kegigihan, kesederhanaan. Jadi setiap cerita harus minimal mengandung satu pesan moral anti korupsi. Teknis pelaksanaannya bisa menggunakan bantuan media dongeng seperti boneka tangan, boneka jari, wayang dan sejenisnya. Sedangkan untuk pemilihan jenis cerita disesuaikan dengan umur anak. Misal berada usia di bawah 4 tahun bisa menggunakan tokoh hewan, namun untuk usia di atas empat sampai enam tahun bisa menggunakan tokoh orang langsung.

Pada tahapan penutupan merupakan pengambilan kesimpulan dari cerita yang kita lakukan. Ini merupakan tujuan akhir dari dongeng, maka usahakan anak dapat mengambil makna atau pesan moral yang kita sampaikan. Untuk memastikan anak dapat mengetahui pesan moral yang terkandung dapat dilakukan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan kesimpulan. Seperti halnya dengan tanya jawab, siapa nama tokoh dalam dongeng, apa yang dilakukan oleh tokoh sehingga dia dicintai temannya, apa akibatnya jika kita tidak jujur, dan sebagainya.

Merasakan pendidikan anti korupsi

Tahapan kedua ini merupakan cara untuk anak dapat merasakan nilai anti korupsi yang tadinya telah disampaikan dalam dongeng. Tujuannya dengan merasakan anak dapat secara jelas memahami tentang pentingnya pendidikan anti korupsi tersebut. Teknis pelaksanaan merasakan nilai dapat dilakukan dengan bermain peran. Sekolah atau lembaga mengatur pembelajaran dengan mengangkat satu persatu tema anti korupsi. Seperti halnya untuk hari Senin guru mengajak anak merasakan nilai kejujuran dengan bermain peran berjualan di sekolah. Ada yang berperan sebagai pembeli, maupun penjual. Dengan di atur yang seperti itu mereka benar memahami konsep aplikatif anti korupsi secara utuh dan tidak berdasar pengetahuan belaka.

Melakukan pendidikan anti korupsi

Pada tahapan yang paling akhir ini mengajak anak untuk dapat melakukan nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Teknis pelaksanaannya menggunakan metode keteladanan dan pembiasaan. Untuk metode keteladanan diperlukan guru yang dapat mencontohkan nilai anti korupsi yang pertama. Mereka harus lebih dulu menjadikan nilai tersebut dalam setiap aktivitasnya. Alasannya anak nanti akan menirukan apa yang dicontoh oleh gurunya. Selain itu juga mengajak orang tuanya yang ada di rumah untuk

senantiasa menjadi teladan yang baik bagi putra putrinya. Jika anak sudah dapat meniru karakter anti korupsi dari orang tua dan gurunya maka selanjutnya dengan membiasakan karakter tersebut. Pihak guru tanggal memantau atau mengamati intensitas anak melakukan nilai tersebut. Jika suatu saat menjumpai anak belum bisa melakukan nilai anti korupsi yang dimaksud dapat memberikan nasehat maupun penguatan ulang.

5. KESIMPULAN

Dongeng merupakan salah satu bagian dari metode pendidikan anak usia dini. Metode tersebut juga relevan digunakan untuk pendidikan anti korupsi. Alasannya karena dongeng sebagai pendidikan dan hiburan. Pelaksanaan dongeng untuk pendidikan anti korupsi adalah dengan cara mengenalkan kepada anak tentang korupsi. Mengajak anak untuk merasakan nilai korupsi, serta melakukan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui nilai anti korupsi dengan cara memberikan dongeng yang di dalamnya termuat sembilan poin nilai anti korupsi yaitu tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli. Selanjutnya dari nilai-nilai itu disampaikan dengan bermain peran supaya anak dapat merasakannya. Serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui keteladanan dan pembiasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2022). *Hasil Diskusi dalam Halaqah Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Solo*. Center, M. D. (2006). *Anti Corruption Education At School*. Vilnius. Lithuania.
- Dharma, B. (2004). *Korupsi dan Budaya*. Dalam Kompas Edisi 25/10/2003.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character, how our school can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Muhammad, A. (2003). *Pendidikan Antikorupsi, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi*. LP3 UMY.
- Nasir, R. (2006). *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*. IAIN Press & LKiS.